

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi darat merupakan sektor yang sangat penting dalam menunjang kelancaran bidang perekonomian, pendidikan, urusan pemerintah dan kepentingan umum lainnya khususnya di Indonesia. Salah satu bentuk transportasi di Indonesia yang paling banyak digunakan adalah transportasi umum. Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa transportasi atau angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Salah satu prasarana menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah halte yang merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sebagai salah satu fasilitas publik, eksistensi sarana pendukung seperti halte seharusnya dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna sesuai standar aturan pengadaannya sehingga keberadaan angkutan umum dapat terus berlanjut. Berdasarkan TATRALOK Kabupaten Tanggamus 2022 terdapat 2 trayek angkutan perdesaan. Berdasarkan hasil survei inventarisasi mengenai jumlah tempat pemberhentian angkutan umum yang berjumlah 3 halte namun tidak di lewati oleh angkutan perdesaan, adapun kondisinya tidak optimal berdasarkan fungsinya, fasilitas serta letak halte tersebut.

Pada angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus berdasarkan data hasil survei Tim PKL Kabupaten Tanggamus tahun 2024 data naik dan turun penumpang yang tinggi dengan jumlah rata-rata 32

penumpang pada trayek Kota Agung – Wonosobo dan 34 penumpang pada trayek Gisting – Talang Padang. Namun para penumpang tersebut banyak naik dan turun dari angkutan umum di sembarang tempat sehingga mengganggu arus lalu lintas. Dengan adanya permasalahan tersebut akan dilakukan perencanaan halte.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penyusunan kertas kerja wajib ini, penulis mengambil judul **“PERENCANAAN LOKASI TITIK HENTI (HALTE) ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN TANGGAMUS”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kondisi fasilitas halte saat ini belum memenuhi standar pedoman teknis dan belum memenuhi kebutuhan yang berada di wilayah studi.
2. Naik dan turunnya penumpang tidak pada halte sehingga mengganggu arus lalu lintas.
3. Data naik dan turun penumpang yang tinggi dengan jumlah rata-rata 32 penumpang pada trayek Kota Agung – Wonosobo dan 34 penumpang pada trayek Gisting – Talang Padang tetapi kondisi halte yang belum memenuhi pada wilayah studi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Berapa kebutuhan lokasi titik henti (halte) yang dibutuhkan angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana desain halte angkutan umum yang sesuai dengan pedoman teknis?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini yaitu untuk mengevaluasi letak tempat pemberhentian angkutan perdesaan eksisting,

dan merencanakan lokasi titik henti (halte) angkutan perdesaan pada Kabupaten Tanggamus. Adapun Tujuan dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung dan mengusulkan titik lokasi halte pada ruas jalan yang dilewati trayek angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus.
2. Memberikan usulan dimensi desain halte angkutan umum yang sesuai dengan pedoman teknis.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Tanggamus yang di lewati trayek angkutan perdesaan Kabupaten Tanggamus.
2. Melakukan identifikasi halte tersebut terletak di kantong penumpang yang banyak terjadi naik dan turun penumpang angkutan perdesaan.
3. Analisis penyediaan fasilitas halte dengan menghitung jarak ideal sesuai dengan pedoman teknis.
4. Memberikan desain fasilitas halte saja tidak sampai perhitungan biaya dan pembebasan lahan.